

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim, Menejemen Keuangan Sektor Publik, *Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Relajar 2003)

Akhmad Khairuddin, *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2010)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Bhenyamin Hoessain, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009)

David M. L Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Timpani Agung, 2007)

Dyah Ochtorina, dan A' an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Irwan Sudjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990)

Joko Prakoso, *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lanilla didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Ghalia Indah, 1984)

Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

Marihot P. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)

Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2010)

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009
Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat

Studi Hukum UII, 2005)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1988)

Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011)

Sadu Wastiono, dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, (Bandung: Fokus Media, 2006)

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Cetakan I, 2002)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2020)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, (Jakarta: Faza Media, 2006),

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1967)

Yoyo Sudaryo, dkk., *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo

Peraturan Daerah Kabupaten Situbodo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

JURNAL

Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir, Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah, *Jurnal Usahawan*, Vol. 35, No. 06

Dito Aditia Darma Nasution, dik, Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Tanjung Balai, Ponorogo: *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2020

Muhammad Safar Nasir, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, 2019

Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kewangan Daerah*, Vol. 2 No. 1, 2019

Irma Yuliani, Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Ponorogo: *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2019

WAWANCARA

Arkizatul, Maharani, Wawancara *Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo*, (Situbondo: 21 Juni 2023)

INTERNET

<https://teropongreformasi.com/2021/02/07/satlantas-polres-situbondo-bersama-dishub-dan-satpol-pp-razia-kendaraan-parkir-liar/> di akses pada 17 Juli 2023

<https://suaraindonesia.co.id/news/pemerintahan/64b16a31a6d6b/Pemkab-Situbondo-Usulkan-Kenaikan-Pajak-dan-Retribusi> di akses pada 17 Juli 2023

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/75913396/target-retribusi-parkir-tak-terpenuhi-dishub-berdalih-pandemi-covid19> di akses pada 17 Juli 2023

<https://memontum.com/satlantas-polres-situbondo-tertibkan-lokasi-parkir-di-jl-pemuda-diponegoro>. diakses pada 09 Juni 2023 pukul 21:12 WIB.

<https://dishub.situbondokab.go.id/> diakses pada 09/07/2023 pada pukul 00:58 WIB

<https://situbondokab.bps.go.id/> diakses pada 09 Juli 2023 pada pukul 00:58 WIB